

TEOKRASI DAN DEMOKRASI
(Komparasi Reflektif Teokrasi Israel Kitab Suci dengan Demokrasi
Langsung di Indonesia)

Roy Charly Sipahutar

Institut Agama Kristen Negeri Tarutung

Abstract: *This paper is a biblical reflective work that seeks to analyze the connectedness between the theocracy ideas in the Old Testament (Israel) and the Direct Democracy System implemented in Indonesia. It is not denied that the two state systems must have their own context, apart from a great distance and time. However, that does not mean there can not be found a wedge between the two. So with this the author tries to explore any ideal values in the theocracy system at the time of Israel Bible that eventually can become a very useful capital for the basic participation of citizens (people) in Indonesia in the direct democratic system. The hope is that people's mood to contribute to their participation in politics can be answered well.*

Keywords: *: Theocracy, Direct Democracy, Israel, Indonesia,*

PENDAHULUAN

Pemilihan Israel adalah sekaligus pernyataan Allah untuk menghususkan atau menguduskan bangsa itu di hadapan Tuhan sehingga Israel “berbeda” dari bangsa-bangsa lain di sekitaran mereka. Israel ditetapkan Tuhan sebagai bangsa yang berdaulat di bawah pemerintahan Allah. Allah yang menjadi raja atas mereka. Di sinilah letak keunikan Israel, Tuhan tidak melepaskan dan membiarkan Israel begitu saja, tetapi senantiasa memerhatikan Israel dalam setiap perjalanannya sebagai sebuah bangsa. Sejak permulaan pembentukan bangsa itu, Ia tetap setia menciptakan sejarah

dan mengikuti jalannya sejarah demi terwujudnya sebuah rencana yang sangat indah, yaitu rencana keselamatan yang dari Allah.

Proses tersebut dimulai dalam pemanggilan Abraham, dimana Tuhan berjanji kepada Abraham bahwa keturunannya akan menjadi bangsa dan berkat yang besar (Kej 12:1-4). Pemanggilan Abraham menjadi langkah awal penetapan perjanjian Allah dan bukti bahwa Allah hadir serta memegang peran utama dalam membentuk Israel sebagai bangsa.¹

¹ Mengenai pemanggilan Israel, banyak ahli masih memperdebatkan, ada juga yang menganggapnya dimulai semenjak Perjanjian Sinai. Lihat Christoph Barth, *Theologia Perjanjian Lama I*, (Jakarta: BPK Gunung

Proses ini merupakan proses berkelanjutan dari karya Tuhan, mempersiapkan sebuah bangsa oleh karena kesempurnaan dan citra Allah dalam penciptaan telah hancur akibat dosa. Artinya, Allah sedang mempersiapkan satu bangsa (yang besar) dari keturunan Adam yang berdosa itu, melalui pemanggilan Abraham dalam kasih-Nya.

Untuk memahami peran dan kepemimpinan Tuhan memimpin Israel sebagai bangsa pilihan, akan dibahas dalam tulisan sederhana ini, sekaligus mengulas pokok persoalan Pemerintahan Allah (Teokrasi) atas umat-Nya dan peran serta umat Tuhan dalam pemerintahan Allah tersebut. Dan selanjutnya kita akan memperbandingkannya dengan Sistem Demokrasi Pemilihan Langsung di

sebuah negara demokrasi terbesar di dunia ketiga, bernama Indonesia. Tulisan ini juga bertepatan menyambut Pemilihan Kepala Daerah secara langsung yang akan diadakan pada pertengahan tahun ini.

TEOKRASI DAN DEMOKRASI TEOKRASI DALAM PERJANJIAN LAMA

Istilah Teokrasi berakar dari Bahasa Yunani “*theokratia*” (*theo* artinya: Allah, *kratos*: kuasa/pemerintahan) yang diterjemahkan menjadi “Pemerintahan Allah” atau sering disebut dengan “Kerajaan Allah” (*the Kingdom of God*). Teokrasi sesungguhnya menunjuk kepada pemerintahan oleh Allah dalam bentuk penyertaan dan pertolongan Allah atas umat-Nya. Secara khusus lebih mengarah pada makna spiritual yaitu Allah menjadi Raja atas umat-Nya. Kerajaan Allah atau pemerintahan Allah menekankan sikap dan kehidupan yang tunduk dan taat kepada Allah.²

Menurut Saut Sirait, konsepsi kekuasaan yang oleh ketidakjelasan mengenai hakikatnya dan berada di luar diri manusia, membuat kekuasaan itu

Mulia, 2008), h. 113. Bahkan Wismoady Wahono lebih gamblang mengatakan bahwa Peristiwa keluaran Israel dari Mesir adalah merupakan hal yang paling pokok dalam pembentukan iman Israel sebagai umat Allah. Keterangan yang sangat karakteristik bagi Allah Perjanjian Lama adalah sebagai berikut: “Akulah Tuhan, Allahmu, yang mengeluarkan engkau dari tanah Mesir”. Allah yang seperti itulah Allah yang selalu diberitakan oleh para nabi. Wismoady Wahono, *Di Sini Kutemukan*, (Jakarta: BPK Gunung Mulia, 2000), h. 107. Demikian pula Hinson melihat bahwa fakta sejarah peristiwa keluaran dari Mesir sebagai inti iman orang Yahudi mendukung kepercayaan bahwa Allah telah memilih orang-orang Yahudi untuk mengabdikan-Nya dengan cara yang khusus. David F. Hinson, *Sejarah Israel Pada Zaman Alkitab*, (Jakarta: BPK Gunung Mulia, 2000), h. 66.

² George Arthur Buttrick, *The Interpreter’s Dictionary of the Bible*, (Nashville: Abingdon Pers, 1986), h. 617. Baca juga Charles J, Adam, dkk. (eds.), *The Encyclopedia of Religion Vol. 7*, (New York: Micmillian Library Reference, 1995), h. 304. Juga Acher, Glearson L. *The Zondervan Pictorial Encyclopedia of the Bible*, (Michigan: Grand Rapids, 1976), h. 875.

menjadi absolut. Dalam banyak hal, pemahaman mengenai kekuasaan yang absolut diletakkan pada *other things/spritual beings* itulah sebenarnya (sadar atau tidak), yang kemudian bergerak menuju suatu penyempurnaan konsepsi yang disebut Teokrasi. Namun perlu disadari konsep Teokrasi tidak lahir dalam lingkungan kepercayaan yang politeistik. Sebab pemanggilan Abraham dan pernyataan Allah kepada Musa memberikan gambaran bagi kita bahwa Tuhan yang satu itulah yang menyatakan diri dalam menyelamatkan umat-Nya. Bagi paham monoteis, Teokrasi akan sangat jelas, berhubung penguasanya tunggal, meski dengan berbagai sifat dan hakikatnya yang khas. Di sanalah tercermin suasana, kondisi, nilai dan sitem Teokrasi itu sendiri.³ Tuhan menjadi penguasa tunggal dan manusia berada dalam kekuasaan-Nya yang dimanifestasikan melalui hukum-hukum-Nya yang pasti dan yang kekal.

Ini berarti Kerajaan Allah bukanlah sebuah konsep “*utopis*”, tetapi kerajaan atau pemerintahan oleh Allah yang nyata di saat kebenaran dan kehendak-Nya dilakukan. Allah yang transenden hadir secara langsung dalam memerintah Israel. “Memerintah” dalam artian T Allah yang memberi mandat untuk memimpin umat-Nya, Dia juga yang memberikan keamanan, kedamaian dan kesejahteraan bagi mereka yang takut akan Dia dan setia atas perjanjian di Sinai (Musa, Israel dengan Allah).⁴ Pemilihan oleh Allah

³ Saut Sirait, *Politik Kristen di Indonesia: Suatu Tinjauan Etis*, (Jakarta: BPK Gunung Mulia, 2001), h. 79-81.

⁴ Lihat Weinfeld, “Berith”, dalam: G. Johannes Botterweck dan Helmer Ringgren

untuk melayani dan panggilan-Nya untuk memberkati baik pribadi maupun seluruh dunia menjadi tanda dari fase dalam berkat Tuhan yang melimpah. Pengangkatan Israel sebagai umat Allah adalah sebuah kisah yang penuh kegembiraan mengenai perlindungan Allah, menciptakan sebuah perjanjian yang kekal antara Allah Yang Maha Kuasa sebagai Bapa dengan Umat Israel sebagi anak yang terkasih.⁵

Sebagai Raja, Allah memerintah atas Israel dalam sebuah lembaga pemerintahan yang berbeda dari yang lain. Dengan jelas pemerintahan Allah digambarkan sebagai kerajaan orang percaya dan setia kepada Tuhan. Jenis pemerintahan ini tidak menyerupai pemerintahan apapun, karena pemerintahan ini diatur oleh pernyataan Allah (Kel 19:5-6). Keunikan utama pemerintahan ini, adalah pemerintahan Allah atas suatu bangsa yang harus kudus sebagai suatu kerajaan imamat. Saut Sirait juga menjelaskan, kerajaan imamat dapat dipahami sebagai suatu sistem yang di dalamnya para imam menjadi penguasa atau pelaksana kekuasaan dari Tuhan. Namun para imam bukanlah representasi dan juga bukan personifikasi Tuhan di dalam kekuasaan ini. Sebab manusia bebas dalam menaati Tuhan. Artinya di dalam Teokrasi tersimpan suatu nilai yang

(eds.), *Theological Dictionary of The Old Testament Vol.II*, (Michigan: Grand Rapids, 1974), h. 252-255. Dalam Perjanjian di Sinai (Kel 24) dapat dilihat esensi perjanjian adalah sebagai suatu kewajiban hukum bahkan tuntutan mutlak bagi seluruh bangsa yang menerima perjanjian tersebut.

⁵ William Dyrness, *Tema-tema dalam Teologi Perjanjian Lama*, (Malang: Gandum Mas, 2000), h. 100-101.

paling mendasar yang berkaitan dengan kehidupan dan kemanusiaan.⁶

Untuk menjalankan fungsi pemerintahan itu Tuhan menunjuk utusan-Nya sebagai perwakilan Allah dalam memimpin bangsa itu. Di mana utusan/wakil Allah diberi kesempatan untuk menjalankan pemerintahan Allah dalam menyuarakan kerajaan imamat tersebut, dalam kaitannya dengan menyatakan hukum, memberikan berkat, meminta pertolongan dan penyertaan Allah serta semua tugas seorang perwakilan atas bangsa-Nya. Pada perjalanan di padang gurun (peristiwa keluaran dari Mesir), Allah menetapkan Musa (Kel 2:24-25; 3:7-14) menjadi perwakilan dalam memimpin Israel. Di samping beberapa orang berpengaruh ditugasi untuk membantu Musa dalam melakukan tugas-tugasnya. Inilah rencana Teokrasi diberikan kepada Musa dan perwakilan bangsa itu (dari golongan tua-tua, atau 'zekenim') sebagai perwakilan Allah.

Dalam pemerintahan Teokrasi, Allah akan memerintah dan memerintah melalui pemerintahan seorang raja manusia. Seorang raja yang harus memerintah dengan kebenaran, yaitu bahwa ia harus memberikan keputusan sesuai keadilan Allah. Di sinilah letak perbedaan bangsa itu dari bangsa-bangsa lain dan pemerintahan yang ada di tengah-tengah kerajaan dunia ini. Sebagaimana sudah dinyatakan di atas, Musa menjadi perwakilan Allah memimpin Israel keluar dari Mesir dan dalam perjalanan

di padang gurun. Selama Tuhan berkenan kepada Musa dan tugas itu diembannya dengan ketaatan/kesetiaan kepada Tuhan, maka Tuhan akan berkenan kepadanya. Kemudian Yosua (Ul 31:7-8) ditetapkan untuk menggantikan Musa sesuai dengan rencana Tuhan dalam meneruskan perjalanan Israel sampai di Tanah Kanaan. Periode kepemimpinan Yosua adalah masa yang sulit, di mana Yosua diberi tugas berat dalam pembagian kepemilikan tanah atas keduabelas suku Israel. Sesuai dengan keputusan dan ketetapan Allah Yosua menjalankan tugasnya sebagai pemimpin atas Israel.

Dalam periode berikutnya (selama suatu kurun waktu tertentu) Israel dipimpin oleh Hakim-hakim (*shofetim*), sebab Israel belum siap menerima pelaksanaan Teokrasi sepenuhnya. Baru kemudian dengan kesadaran akan sistem pemerintahan yang ada di sekitar mereka, Israel mulai memikirkan untuk memiliki seorang raja yang memerintah atas mereka. Namun perlu digarisbawahi kehadiran seorang raja bagi umat Israel tidak terlepas dengan kehadiran Allah. Sebab sesungguhnya raja yang dipilih adalah seseorang yang berkenan kepada Allah; setia, melakukan hukum-Nya dan menjadi alat Tuhan dalam menyatakan kerajaan-Nya. Untuk itulah Tuhan memilih Saul menjadi raja (Ibr. *melekh*, 1 Sam 10:24), Tuhan berkenan kepadanya. Namun di saat Saul tidak mengindahkan Tuhan dan Tuhan tidak berkenan kepadanya (15:28), maka Saul kemudian diganti dengan raja yang baru yaitu Daud (16:11-13). Raja adalah seorang pejabat resmi yang

⁶ Saut Sirait, *Politik Kristen di Indonesia: Suatu Tinjauan Etis*, hl. 81.

bertanggung jawab mengenai hal-hal kekudusan di mana ia harus menjaga kuasa yang besar yang diberikan kepadanya dengan penuh konsistensi. Dia juga sebagai pemimpin peperangan ilahi, dan Yahweh sendirilah yang akan memerintahnya untuk melakukan sesuatu yang akan mewujudkan rencana Yahweh.⁷ Demikianlah Tuhan menentukan siapa yang layak untuk memerintah sebagai perwakilan-Nya atas Israel. Selama periode kerajaan Israel hingga kehancurannya sesungguhnya Tuhanlah yang bertaruh untuk pemerintahan tersebut.

Demikian halnya di saat Israel berada dalam pembuangan Tuhan sendiri yang memimpin mereka dan menetapkan jalan bagi bangsa itu untuk kembali. Pada masa ini kehadiran Nabi menjadi pencerminan kehadiran Allah. Para Nabi memberikan kekuatan dan membawa pengharapan akan perubahan yang lebih baik pada masa yang akan datang. Dengan demikian kehadiran Nabi, menjadi jawaban bahwa Tuhan masih berkenan kepada Israel. Peristiwa kepulangan dari pembuangan (Babilonia) merupakan bukti bahwa Allah masih mengasihi umat-Nya dan berkenan untuk memperbaharui janji-Nya atas Israel.

DEMOKRASI (SECARA UMUM)

⁷ Horst Seebass, "Bachar", dalam: G. Johannes Botterweck dan Helmer Ringgren (eds.), *Theological Dictionary of The Old Testament Vol.II*, (Michigan: Grand Rapids, 1974), h. 74.

Demokrasi berakar dalam kata Yunani *demokratia*, yang berarti "penguasaan oleh rakyat". Demokrasi berasal dari kata *demos* (rakyat) dan *cratos* (pemerintah) memiliki esensi pada perkataan rakyat dan kenyataan bahwa rakyat yang mengatur (*rule of the people*).⁸ Pengertian ini dikembangkan oleh Abraham Lincoln dalam pidatonya di Gettysburg tahun 1863, yakni: "*government of people, by people, for people*" (pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat).⁹ Meskipun di dalam prosesnya rakyat secara menyeluruh tidak dapat mengatur secara langsung, rakyat dapat melakukannya melalui representasi yang mereka tentukan melalui pilihan sendiri. Itu berarti juga bahwa kekuasaan tetap berada di tangan rakyat. Dalam hal ini penekanannya adalah persetujuan (*consent*) dari rakyat. Dalam kerangka yang seperti ini tidak ada seorangpun yang memiliki kebenaran absolut.¹⁰ Oleh karena berbagai kepentingan dan golongan yang terlibat secara langsung dalam pelaksanaan demokrasi, maka demokrasi ditantang untuk terbuka dalam dialog dan diskusi. Sebab tidak

⁸ A. Hoogerwerf, *Politikologi*, (Jakarta: Erlangga, 1985), h. 174.

⁹ Saut Sirait, Saut Sirait, *Politik Kristen di Indonesia: Suatu Tinjauan Etis*, h. 29.

¹⁰ Lihat Victor Silaen (ed.), *Peran Kristen Dalam Membangun Masyarakat Sipil*, (Jakarta: Pustaka Tangga, 2004), h. 45. Demokrasi adalah sistem pemerintahan rakyat dimana yang menyelenggarakan pemerintahan adalah rakyat, atau setidaknya rakyat diikutsertakan untuk membicarakan masalah-masalah pemerintahan. Joeniarto, *Demokrasi dan Sistem Pemerintahan Negara*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1990), h. 18.

ada keputusan yang diambil oleh satu pribadi/satu pihak, satu kelompok, atau satu golongan tertentu. Dengan demikian musyawarah menjadi instrumen penting untuk menemukan kebijakan dan keputusan yang berlaku untuk semua pihak dalam setiap lapisan. Dalam hal ini demokrasi harus lebih menekankan pengaturan dasar (konstitusi) menyangkut hak-hak minoritas, agar mereka tidak diperlakukan sebagai musuh dalam sistem. Di mana konstitusi menjadi pelembagaan demokrasi di setiap negara yang merupakan faktor yang sangat fundamental.

Sesuai dengan esensi demokrasi, paling tidak ada tiga fungsi yang perlu diperhatikan pada tiap konstitusi suatu negara yang bersifat demokratis, yaitu: pertama adalah bahwa Konstitusi itu merupakan ungkapan dari persetujuan (keinginan) rakyat dan dengan itu rakyatlah yang sungguh-sungguh menetapkannya sendiri. Kedua, di dalamnya ada kepastian mengenai tatanan dan bentuk negara. Dan terakhir adalah Konstitusi harus memberi dan sekaligus membatasi kekuasaan yang dimiliki pemerintah.¹¹ Prinsip lain yang perlu dalam demokrasi adalah pengakuan kesetaraan (*equality*). Bukan berarti semua orang identik namun dalam hal-hal yang paling fundamental semua orang harus mengakui dan menghormati kesetaraan mereka. Dengan demikian dapat dikatakan demokrasi sangat menekankan

penghargaan atas individu dan harkat manusia.

PARTISIPASI MASYARAKAT (UMAT) DAN PEMILIHAN LANGSUNG

Demokrasi ada di tangan rakyat, oleh karena itu rakyat yang menentukan, rakyat yang memilih dan memberikan kepercayaan kepada pemerintah dalam mengemban tugasnya sebagai pememerintah. Untuk itu, partisipasi dan tanggung jawab setiap orang menjadi jawaban atas tuntutan dan fungsi demokrasi itu sendiri. Masyarakat sipil adalah kunci penting dalam memertalikan bentuk demokrasi perwakilan dan demokrasi partisipasif dengan demokrasi langsung.¹² Untuk inilah pemilihan (langsung) menjadi alat untuk pendewasaan politik dan pemahaman demokrasi bagi masyarakat. Apalagi dengan banyaknya kecurangan-kecurangan yang sering terjadi dalam proses pemilihan tersebut. Fakta mencatat bahwa tidak sedikit anggota perwakilan rakyat yang dengan sewenang-wenang menggunakan haknya untuk kepentingan sendiri. Kepercayaan yang telah diberikan dipergunakan semata-mata hanya sebagai alat untuk kepentingan pribadi dan golongan/ kelompoknya. Sudah seharusnya para elit politik yang telah dipilih dan dipercayakan untuk mengemban tugas oleh rakyat lebih

¹¹ Saut Sirait, Saut Sirait, *Politik Kristen di Indonesia: Suatu Tinjauan Etis*, h. 30-31.

¹² John W. Gruchy, *Agama Kristen dan demokrasi: Suatu Teologi bagi Tata Dunia yang Adil*, (Jakarta: BPK Gunung Mulia, 2003), h. 23.

berorientasi kepada kepentingan masyarakat banyak.

Pemungutan suara berkala guna memilih wakil adalah suatu elemen penting dalam proses demokrasi, tetapi demokrasi tak dapat diturunkan menjadi hanya sebatas kunjungan ke tempat pemungutan suara. Walau dalam pemungutan suara menjadi bukti dan kenyataan keterlibatan masyarakat dalam menentukan arah kebijakan politik dan kebijakan pemerintah itu sendiri. Dengan demikian, masyarakat (umat) sangat menentukan dalam pelaksanaan demokrasi secara khusus dalam pemilihan langsung. Partisipasi yang positif dan membangun, memilih perwakilan yang bersih, jujur, bisa dipercaya dan memerjuangkan hak-hak masyarakat menjadi kewajiban umat/jemaat dalam memilih. Bisa saja banyak pilihan yang ada, namun selektifitas dan kearifan memerhatikan kinerja setiap calon, menimbang misi dan visi yang memerhatikan dan memperjuangkan kepentingan rakyat dan tidak melihat pilihan yang ada dari subjektifitas pribadi oleh hubungan darah dan emosional semata. Makna inilah yang harus diperhatikan dan dikembangkan. Artinya pilihan yang kita tetapkan adalah sesuai dengan rencana dan kehendak Tuhan, atau sesuai dengan pilihan Tuhan.

Teokrasi dalam kehadiran utusan/perwakilan

Sebagaimana sudah dituliskan di atas, dalam pemerintahan Teokrasi, Allah memegang kepemimpinan dengan menentukan segala sesuatu yang terbaik untuk umat-Nya. Ada banyak simbol-simbol pemerintahan

yang bernuansa politik dalam kehadiran Allah bagi umat-Nya melalui para utusan. Hal tersebut dapat ditemui dalam justifikasi teologis adalah pengenaan istilah Kata *Yisra'el*, Kej 32:28-29 menyebutkan alasan penyebutannya dengan kalimat: "... sebab engkau telah bergumul melawan Allah dan manusia, dan engkau menang". (KJV : "... *or as a prince hast thou power with God and with men, and hast prevailed*"). Ada sebuah kata kerja yang dipakai sejajar antara Allah dan manusia, yaitu kata *sarah*, yang memiliki arti "bergumul" (*struggle*)¹³ atau "bekerja keras" (*strive*, New American Standart Bible). Sebutan yang menunjuk kepemilikan Allah atas Israel.

Untuk wujud pernyataan ini para utusan Allah (Hakim-hakim, Nabi, Imam dan Raja) memegang peranan yang strategis. Musa memimpin Israel ke luar dari Mesir, oleh karena Tuhan yang memberi kekuasaan sebagai

¹³ H.J.Zobel, "Yisra'el", dalam G. Johannes Botterweck dan Helmer Ringgren (eds.), *Theological Dictionary of The Old Testament Vol.VI*, (Michigan: Grand Rapids, 1974), h. 399. Selanjutnya para ahli Perjanjian Lama melihat bahwa faktor keilahian tidaklah mungkin menjadi objek dari sesuatu, dan dikarenakan bahwa "El" bukanlah hanya sebatas sebuah sebutan biasa tetapi merupakan nama dari Allah bernama "El", maka Israel haruslah berarti "El-struggles" (El-bergumul) atau "El-strives" (El-bekerja keras). Ungkapan ini sangat cocok untuk menggambarkan apa yang akan Allah perbuat bagi bangsa pilihan-Nya ini pada waktu-waktu yang selanjutnya dalam perjalanan mereka sebagai bangsanya "El". H.L.Elisson, *The Message of the Old Testament*, (Michigan: Grand Rapids, 1969), h. 28-29.

wakil-Nya, para hakim berjuang untuk Israel adalah atas kehendak Tuhan dan Israel memilih untuk dipimpin oleh seorang raja adalah juga nantinya harus di bawah kehendak Tuhan, demikian juga para Nabi memberikan petunjuk dan rencana Tuhan adalah atas kehendak Tuhan sebagai pemimpin atas bangsa-Nya, sekaligus dalam rangkaian pewujudnyataan rencana penyelamatan yang Tuhan buat dalam pemanggilan Abraham.

Pengangkatan Saul sebagai raja atas Israel paling tidak dipengaruhi oleh tiga hal:

1. Adanya perilaku dan tindakan-tindakan korup dan memerkaya diri sendiri di jajaran elit (1 Sam 8:3) dan berarti hukum etis tidak ditegakkan.
2. Krisis kepemimpinan nasional akibat Samuel yang sudah uzur (8:5) dan hilangnya kepercayaan kepada pengganti, anak Samuel sendiri disebabkan ketamakannya terhadap harta.
3. Purbasangka akan adanya serangan dari Filistin (9:1-10:16).¹⁴

Pada prinsipnya Samuel tidak setuju atas usul pemilihan dan pengangkatan raja atas Israel, dengan berpedoman kepada pemerintahan dan kepemimpinan Allah melalui dirinya sendiri. Namun oleh karena Tuhan Allah sudah berkehendak maka raja harus dipilih untuk mewakili Allah dan menggantikan peranan Hakim-hakim

dalam memimpin Israel dengan segala konsekuensi yang ada di dalamnya (8:7-21).¹⁵ Tugas, peranan dan fungsi pemerintahan itu diembankan kepada raja, namun Tuhan tidak melepaskan mereka begitu saja. Ketika seorang raja tidak berkenan dihadapan Tuhan, maka haknya akan diambil dan diberikan kepada orang lain yang setia dan takut akan Tuhan (16:1), hal serupa juga terjadi kepada Daud yang sangat dikasihi Tuhan, oleh karena kejahatan dan pemberontakannya tidak mengindahkan hukum, maka Tuhan tidak berkenan kepadanya. Ini menjadi bukti bahwa Tuhan tidak membiarkan Israel, umat yang dikasihi-Nya itu terlepas dari kepemimpinan-Nya.

Namun demikian, pemilihan oleh Allah juga mendatangkan hukuman bagi bangsa-Nya yang melenceng dan melupakan jalan Allah, keadilan dan kebenaran. Ketika raja dan rakyatnya memilih untuk tidak mengindahkan hukum Tuhan, maka tangis yang akan menjadi bagian hidup mereka. Lihatlah bagaimana sejarah selanjutnya, karena kebijakan pajak yang sangat tinggi yang diterapkan oleh Salomo, raja yang selanjutnya, maka pemerintahan Israel menjadi melemah, kebanyakan dari bangsa-bangsa yang

¹⁴ Saut Sirait, Saut Sirait, *Politik Kristen di Indonesia: Suatu Tinjauan Etis*, h. 100.

¹⁵ Sesungguhnya kata *bachar* adalah bahasa yang menunjuk kepada gambaran raja yang memerintah secara jaya. Dimana kata ini menjadi sebuah jaminan pemeliharaan Allah kepada oknum raja yang Yahweh telah tentukan dalam setiap peperangan dan kebijakan-kebijakan untuk memimpin rakyatnya dengan bijaksana. Namun sekaligus juga tuntutan kepatuhan yang penuh kepada Siapa yang telah memilihnya.

ditundukkan sebelumnya memperoleh kembali kemerdekaan mereka. Sedangkan suku-suku Israel sendiri menjadi pecah menjadi dua kerajaan, yakni di utara kerajaan Israel yang meninggalkan kesetiiaannya terhadap takhta Daud, dan yang di selatan kerajaan Yehuda, meliputi wilayah suku Yehuda dan Benyamin, di mana keturunan Daud dan Salomo terus memerintah di ibukota Yerusalem.

Tetapi kita juga harus cermat melihat bagaimana kasih penyertaan Tuhan, ketika kerajaan Israel dan Yehuda hancur (takluk) atas Babilonia, Tuhan kembali mengutus nabi untuk menghibur, menguatkan dan meneguhkan Israel di pembuangan. Tuhan sendiri yang akan berperang kepada musuh-musuh mereka dan akan membawa Israel kembali ke Tanah Kanaan, inilah janji Tuhan melalui kehadiran-Nya dengan perantaraan para Nabi. Jaminan keselamatan sebagaimana Tuhan tetapkan diperbaharui dan dikumandangkan kembali dengan kehadiran para Nabi.¹⁶

¹⁶ Kata Nabi sepadan dengan kata *nabi* dalam bahasa Ibrani. Akar dan arti dasarnya telah lama diperdebatkan, tapi umumnya diterima berarti “memanggil” atau “seorang yang dipanggil”. Nabi dapat juga disebut penyampai atau juru bicara (*spokesman*) atau juga pembicara (*speaker*), seperti seorang yang berbicara dengan kuasa yang lain. Karena itu, nabi berarti seseorang yang dipanggil oleh Allah, dan dalam Perjanjian Lama khususnya berarti seseorang yang dipanggil untuk berbicara atas nama Allah. William Sanford Lasor, dkk., *Old Testament Survey: The Message, Form, and Background of the Old Testament*, (Michigan: Grand Rapids, 1969), h. 183. Barth menghubungkan pengutusan dengan

Nabi adalah utusan atau pembawa berita. Allah mengangkat orang yang dipilih-Nya dan memberikan kepercayaan sepenuhnya melaksanakan perintah-perintah-Nya. Allah juga memerlengkapi mereka sesuai dengan kebutuhan dan kelemahan mereka. Nabi dipandang sebagai tokoh yang memiliki hubungan yang khusus dengan Tuhan. Akan tetapi nabi juga memiliki tanggung jawab moral yang bersifat pribadi yang diberikan Tuhan kepadanya demi terjaganya Teokrasi yang semestinya. Sehingga seorang nabi melaksanakan tugasnya dengan penuh tanggung jawab demi kemuliaan Allah. Allah melalui para nabi, menginginkan agar umat-Nya semakin dekat kepada-Nya. Nabi adalah hamba Tuhan yang menuntun, membimbing, dan mengajar umat Allah, menyampaikan berita atau nubuatan dengan tujuan agar umat itu hidup berpadanan dengan Allah.

Nabi berbicara sebagai “penyambung lidah” Allah. Ia tidak berbicara untuk menyampaikan kehendaknya kepada manusia, tetapi kehendak Allah. Sehingga dapat dikatakan bahwa nabi sebagai

pengangkatan seorang nabi. Nabi yang sesungguhnya adalah seorang yang diutus dan membawa pesan Tuhan kepada umat-Nya. Lihat Christoph Barth, *Theologia Perjanjian Lama III*, (Jakarta: BPK Gunung Mulia, 2001), h. 151. Dalam Alkitab dikatakan, bahwa ketika Raja-raja dan penguasa menelantarkan rakyat, tidak membela nasib orang miskin, yatim-piatu dan janda-janda, maka nabi-nabi muncul dan mengkritik pemerintah yang korup itu. Politik kenabian atau gerakan moral agama adalah perjuangan untuk menegakkan keadilan dalam masyarakat.

penyampai berita Allah, atau memberitakan nubuatan atas nama Tuhan, bukan sebagai peramal melainkan mengumumkan sesuatu hal yang disampaikan Tuhan. Dengan demikian, nabi sebagai hamba Tuhan yang bertugas sebagai pemimpin umat Allah. Artinya merupakan alat Tuhan untuk menyampaikan kehendak-Nya dan juga menyampaikan hukuman kepada umat-Nya. Tugas nabi adalah membawa, membimbing umat untuk melaksanakan firman Tuhan dalam kehidupan mereka sebagai umat Tuhan. Sebagai hamba yang taat kepada Tuhan dalam melaksanakan tugasnya, sesungguhnya nabi tidak memperhitungkan resiko yang akan ia alami, karena ia harus melaksanakan tanggung jawabnya sebagai pribadi yang dipilih. Kepercayaan kepada Allah merupakan modal yang cukup bagi seorang nabi untuk melaksanakan tugas kenabiannya. Teokrasi yang memilih para hamba-Nya dan yang menuntut ketaatan penuh dari setiap mereka yang mendapatkan anugerah pemilihan tersebut.

Dalam Perjanjian Lama partisipasi umat tidak diabaikan begitu saja, kita bisa melihat partisipasi umat dalam kehadiran para tua-tua ('*zekenim*') untuk menentukan arah kebijakan dan kepemimpinan di tengah-tengah Israel. Penghargaan demikian bisa memberikan makna bahwa peranan umat dalam kehadiran para tua-tua adalah simbol keikutsertaan umat (hampir bisa dikatakan sama dengan demokrasi parlementer, walau *zakenim* bukanlah parlemen dalam pemerintahan itu namun adalah perwakilan dalam

pemerintahan). Dalam hal ini kuasa raja (*melekh*) seolah-olah berbagi dengan *zakenim*, *roshi*, *sofetim*, *gibbore chail* dan *sarim* (sipil tetapi fungsi militer kemudian lebih mencakup di dalamnya).¹⁷

Pada awalnya pemerintahan dicirikan oleh primordialisme dan keterikatan kepada keluarga (*beth abboth*) dan kepada kaumnya (*mispacha*) yang kemudian berkembang kepada kekuasaan politik teritorial. Mereka dipersatukan dalam sub-sub pemerintahan tersendiri seperti desa. Dan pada akhirnya peranan ini berkembang dengan kehadiran dan partisipasi yang nyata dalam menentukan kebijakan pemerintahan. Kita bisa melihat contoh yang dikatakan oleh tua-tua Israel kepada Samuel sebagai penolakan atas kehadiran anak-anaknya dan keinginan untuk pengangkatan seorang raja. Para tua-tua datang kepada Samuel dengan mengatakan keinginan rakyat yang mereka bawa kepada Samuel. Ini berarti rakyat/umat Israel turut serta dalam menentukan perjalanan bangsanya, walau dalam bentuk penyampaian melalui perwakilan *zakenim*. Umat Israel tidak pasif dan menerima begitu saja keadaan dalam kepemimpinan seorang utusan Allah. Mereka terlibat secara langsung dan memiliki peranan yang strategis dalam pengambilan

¹⁷ Bandingkan dengan penjelasan Saut Sirait atas: *zakenim* (tua-tua), *roshi*, *sofetim*, *gibbore chail* (orang kaya raya) dan *sarim* (sipil dan militer). Saut Sirait, Saut Sirait, *Politik Kristen di Indonesia: Suatu Tinjauan Etis*, h. 89-91.

keputusan dan penetapan arah kebijakan perjalanan bangsa itu. Walau dalam prakteknya, keinginan umat lebih bernuansa sungut-sungut oleh karena keinginan dan pemahaman manusiawi yang diletakkan dalam memahami rencana dan kehendak Allah.

MEMAKNAI DEMOKRASI DAN PELAKSANAAN PEMILIHAN LANGSUNG DI INDONESIA

Demokrasi terus berkembang seiring dengan kemajuan pemikiran dan tantangan pemerintahan yang dihadapi. Jikalau pada masa sekarang berkembang berbagai sistem pemerintahan negara oleh karena kemajuan demokorasi, namun di sanalah demokrasi tetap dilaksanakan sesuai dengan tuntutan demokrasi itu sendiri. Demokrasi apapun yang dikembangkan dan dijunjung tinggi dalam satu negara tertentu, sudah pasti akan menuntut tanggung jawab, peran serta dan kehadiran umat/rakyatnya dalam menentukan arah kebijakan negaranya. Memang tidak mungkin semua rakyat memimpin secara bersama-sama. Untuk itu dilaksanakan pemilihan untuk menentukan pemimpin yang tepat dan wakil yang memerhatikan hak-hak dan kepentingan masyarakat. Jika tidak demikian, maka tidak akan ada seorang pemimpin yang memerintah atas kelompok tersebut (Negara: Presiden, daerah: Gubernur, Bupati dan lain-lain).

Misalnya saja dalam menentukan atau memilih seorang pemimpin (seperti kepala daerah), rakyat memegang peranan penting. Ada juga pemahaman yang mengatakan bahwa suara rakyat adalah “suara Tuhan” Jikalau suara itu didengar (*vox populi*

vox Dei, artinya Tuhan yang memberikan ketetapan hati) maka siapapun yang dipilih adalah yang terbaik. Hanya setiap orang perlu mendasarkan pilihannya kepada “suara Tuhan”, di mana kehendak dan keinginan Tuhan akan menjadi faktor utama. Dalam hal tersebut, Tuhan yang menentukan. Dan jikalau ada pilihan yang tidak sesuai dengan kehendak Tuhan atau seorang pemimpin yang terpilih tidak berkenan di hadapan Tuhan, maka hak kepemimpinannya tidak berjalan dengan baik dan akan dicabut Tuhan darinya.

Dalam prespektif Perjanjian Lama misalnya sudah ditunjukkan bahwa Tuhanlah yang memilih Abraham dalam karya penyelamatan-Nya, demikian juga para utusan-Nya adalah untuk menjaga kesenimbangan dan ketetapan pemilihan Allah atas Israel. Dalam hal ini Tuhan menginginkan pemimpin yang setia dan takut kepada hukum dan ketetapan-Nya.¹⁸ Hal itu adalah untuk maksud menjaga kesejahteraan dan kemakmuran, kedamaian dan ketenteraman bangsa-Nya. Negara tidaklah lagi dipandang hanya secara terus-menerus sebagai pusat kekuasaan yang mendikte dan dapat mematikan dinamika hidup masyarakat, tetapi adalah sebuah

¹⁸ Yahweh dengan pertimbangan-Nya sendiri dan secara cermat telah memilih dalam keagungan-Nya, bertindak bebas, dan menuntut pertanggungjawaban atas pemilihan tersebut. Tidak ada ketetapan mengapa panggilan itu ditujukan kepada yang bersangkutan, hal itu tetap merupakan rahasia yang seluruhnya berasal dari inisiatif Allah. Wismoody Wahono, *Di Sini Kutemukan*, (Jakarta: BPK Gunung Mulia, 2000), h. 95.

instrumen politis demi hidup bersama yang sejahtera.¹⁹ Pemimpin yang memerjuangkan hak-hak dan kepentingan rakyat banyak adalah pemimpin yang Tuhan kehendaki. Jika ada pemimpin yang tidak berkenan di hadapan Tuhan oleh karena menutup mata atas hak dan kepentingan rakyat, maka Tuhan sendirilah yang akan mengambil hak itu dari padanya.

Tuhan pun ingin setiap bangsa (tempat di mana orang percaya tinggal) diperintah oleh seseorang yang takut akan Tuhan. Karena Tuhan tidak menginginkan bangsa-Nya hidup dalam kemelaratan, hidup dalam ketidaktenangan, kekacauan dan kehancuran, hidup dalam tekanan dan diperbudak oleh pemerintahnya sendiri atau diperbudak oleh bangsa lainnya. Ada banyak contoh yang bisa kita lihat dalam Perjanjian Lama yang semuanya bermuara kepada kehendak Tuhan, Allah Israel yang hidup. Dengan melihat perkembangan politik di Indonesia saat ini, walau setiap saat dielu-elukan selogan demokrasi dan pembelaan hak-hak masyarakat banyak, tetapi dalam pelaksanaannya masih jauh dari kenyataan yang seharusnya. Hal ini dipengaruhi oleh kepentingan golongan tertentu dan kepentingan pribadi pemimpin itu. Sehingga seolah-olah mata politik tertutup dengan garis kebijakan politik kepemimpinan yang sudah ditetapkan. Sebuah pertanyaan yang harus ditelaah lebih jauh, bagaimana seorang pemimpin bisa

melakukan tugas kepemimpinannya dengan baik kalau berada di bawah bayang-bayang kebijakan politik dan kepentingan golongan (partai) tertentu? Atau bagaimana mungkin kebijakan akan berpihak kepada rakyat banyak, kalau ukuran yang dipakai adalah kepentingan elit-elit politik dan golongan elit lainnya?

Untuk itulah, demokrasi dan hak suara yang berada di tangan rakyat harus dipergunakan sebaik-baiknya untuk kepentingan bangsa. Dalam artian, memilih orang-orang yang tepat memimpin negara atau daerahnya masing-masing dan juga memilih orang-orang yang layak duduk di bangku legislatif yang dipercaya membela hak-hak dan kepentingan masyarakat kebanyakan, dan pemimpin negara (Presiden) yang peduli dan memerhatikan rakyat kecil (sebagai golongan miskin dan melarat).²⁰ Ketika jumlah bilangan warga Indonesia bertambah dalam daftar 200 orang terkaya di Asia, tetapi sekaligus juga jumlah penduduk Indonesia

¹⁹ Einar M. Sitompul, *Teologi Politik : Agama-Agama Kekuasaan*, (Jakarta :BPP PGI, 2004), h. 152.

²⁰ Fungsi penting Badan Perwakilan harus disadari benar-benar oleh setiap anggota Badan Perwakilan tersebut selaku wakil-wakil daripada rakyat. Kesadaran bahwa setiap keputusan dari Badan Perwakilan ini akan membawa akibat langsung atau tidak terhadap keuntungan atau kerugian bagi rakyatnya. Oleh karena itu pemilihan wakil-wakil rakyat di dalam negara demokrasi dengan pemilihan langsung seperti Indonesia benar-benar merupakan masalah yang prinsipil, rakyat harus sangat berhati-hati menentukan pilihan. Lihat juga Joeniarto, *Demokrasi dan Sistem Pemerintahan Negara*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1990), h. 24.

berpenghasilan sangat rendah mencapai lebih dari sepertiganya. Bahkan data terakhir tahun 2009 mengatakan, Bank dunia mendefinisikan seorang dikatakan miskin jika berpenghasilan kurang dari \$2 per-hari, atas definisi ini orang miskin di Indonesia mencapai angka 49,5 % (sekitar 110 juta jiwa) dan jumlah pengangguran lebih 40 juta orang.²¹ Mungkin dasawarsa terakhir ini tidak begitu jauh berubah, atau lebih burutk (?). Ironis! Negara ini kaya, tetapi hanya untuk segelintir orang, pemimpin bangsa akan diminta pertanggungjawabannya untuk hal ini. Jutaan anak negeri tidak berkesempatan untuk menikmatinya.

Memang masih bisa kita katakan bahwa demokrasi dan Pemilihan Langsung di Indonesia masih belum menyentuh kepada makna yang sesungguhnya. Di mana banyak rakyat belum memahami fungsi dan peran sertanya dalam menentukan perjalanan suatu daerah dan bangsanya sendiri dalam pemilihan langsung. Sehingga banyak persoalan yang muncul sebagai akibat ketidaksetujuan dan kesalahan dalam mempergunakan hak-hak suaranya.²² Hak memilih dan dipilih tidak terlepas dari kepercayaan yang diberikan Tuhan. Sebagai pemilih kita diberikan kesempatan sebagai utusan Allah dalam menyatakan kebenaran, kehendak dan kesempurnaan kasih-Nya melalui hak suara yang kita miliki. Hak

suara itu adalah hak menjadi perwakilan Tuhan dalam memilih orang yang tepat sesuai dengan kehendak Tuhan. Sedangkan kepercayaan untuk dipilih adalah kepercayaan untuk mengemban tugas dan sebagai utusan Tuhan dalam menyatakan dan melakukan kebenaran-Nya melalui pemerintahan. Kepercayaan dan kesempatan sebagai utusan diberikan Tuhan untuk maksud dan pernyataan-Nya atas keselamatan dan kesempurnaan janji-Nya.²³ Dengan demikian baik partisipasi memilih dan dipilih dalam demokrasi dan pemilihan langsung di Indonesia adalah berasal dari Tuhan dan harus dipertanggungjawabkan kembali kepada Tuhan. Namun demikian, baiklah dipahami dalam sistem demokrasi pada prinsipnya menolak setiap campur tangan dari luar atas jalan hidup seseorang, dan pada saat yang sama menuntut bahwa hak individu untuk menentukan diri sendiri secara politis harus mendapat prioritas dibanding dengan hak-hak politik lain.²⁴ Demokrasi sebagai sistem politik merupakan refleksi yang paling nyata dari pengakuan akan hak individu atas kebebasan politik, dan dengan ini terbukanya peluang yang sebesar-besarnya bagi partisipasi semua warga. Dengan demikian, masyarakat

²¹ Muchtar Efendi dan Sutopo, *Kegagalan Pemerintah dalam fakta dan angka*, (Jakarta: Pustaka Fahima, 2010), h. 8-9.

²² Kacung Marijan, *Pilkada Langsung: Resiko Politik, Biaya Ekonomi, Akuntabilitas Politik, dan Demokrasi Lokal*, <http://www.komunitasdemokrasi.or.id> (e-mail: info@komunitasdemokrasi.or.id).

²³ Bandingkan tanggung jawab setiap siapapun yang dipilih Tuhan dalam Perjanjian Lama, menjadi saksi kebenaran dan penegakan keadilan yang setia. H. Rothlisberger, *Firmanku Seperti Api*, (Jakarta: BPK Gunung Mulia, 2010), h. 49-50.

²⁴ Andre Ata Ujan, *Keadilan dan Demokrasi*, (Yogyakarta: Kanisius, 2001), h. 102.

Indonesia seluruhnya sangat menentukan dalam pelaksanaan demokrasi secara khusus dalam pemilihan langsung. Partisipasi yang positif dalam memilih perwakilan yang bersih, jujur, bisa dipercaya yang memperjuangkan hak-hak masyarakat menjadi rasionalitas umat dalam memilih. Untuk itu dibutuhkan selektifitas dan kearifan memerhatikan kinerja setiap calon, menimbang misi dan visi dalam memerhatikan dan memerjuangkan kepentingan rakyat dan tidak melihat pilihan yang ada dari subjektifitas pribadi oleh hubungan darah dan emosional semata.²⁵

PENUTUP

Sebagaimana sudah dijelaskan di atas, setiap warga negara yang baik turut serta berpartisipasi dalam mewujudkan pemerintahan yang bersih, jujur, adil dan bertanggung jawab. Hal itu dapat terwujud dengan keterlibatan masyarakat dalam demokrasi dan partisipasinya dalam pemilihan langsung. Baik sebagai orang

yang mau dipilih ataupun sebagai pemilih, masing-masing orang sangat prinsipil menggunakan hak yang ada padanya. Tidak ada warga negara kelas satu dan tidak ada ada warga negara kelas dua, tidak ada golongan pemimpin dan golongan rakyat biasa. Semua orang bisa untuk dipilih dan memilih.

Dalam hal dipilih, hendaknya orang-orang yang ingin menjadi pemimpin adalah orang-orang yang jujur, bersih, adil dan bertanggung jawab. Sebab saat dia berkehendak untuk dipilih berarti orang tersebut bercita-cita untuk menyatakan kerajaan Allah dalam pemerintahannya (baik dia Kristen maupun non-Kristen). Pemerintahan yang berkenan di hati Tuhan, adalah pemerintahan yang sesuai dengan hukum dan ketetapan-Nya. Dimana para pemimpin dan pelaku hukum takut kepada Tuhan dan memerjuangkan hak-hak masyarakatnya. Sedangkan sebagai pemilih, masyarakat diberikan kepercayaan untuk menggunakan hak suaranya sesuai dengan kehendak Tuhan. Karena pemilih adalah perpanjangan tangan Tuhan dalam mewujudkan kerajaan-Nya di tengah-tengah dunia ini. Baik dalam gereja maupun dalam pemerintahan negara. Inilah tugas dan tanggung jawab sebagai warga negara yang baik, yang setia kepada negaranya. Tanggung jawab yang tidak boleh dihindarkan tapi harus terus dijungjung tinggi. Demokrasi tanpa rakyat, bukanlah demokrasi dan rakyat tanpa demokrasi juga bukan demokrasi. Selogan yang sering diserukan KPU (Komisi

²⁵ Mengenai hal ini Samuel P. Huntington mengatakan bahwa tentu sekali tingkat rasional penggunaan suara oleh umat sebagai bentuk partisipasi politik, khususnya di Indonesia, berbanding lurus dengan tingkat modernitas peradaban (termasuk pendidikan, ekonomi) masyarakat. Bagaimana umat mampu untuk lebih kritis memaknai haknya dan mengawasi jalannya pemerintahan, termasuk di dalamnya. Samuel P. Huntington, *Tertib Politik pada Masyarakat yang sedang Berubah*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004), h. 41-43.

Pemilihan Umum) adalah: “rakyat memilih, rakyat yang menentukan!”

Tuhan adalah Raja dan berkuasa atas umat-Nya. Pemerintahan Tuhan sangat jelas tercermin dalam keadilan dan pertolongan-Nya. Pemerintahan itu sudah dimulai sejak penciptaan, namun oleh karena kegagalan kesempurnaan ciptaan akibat dosa, pemerintahan Allah diperbaharui dengan pemanggilan dan pemilihan Abraham untuk menjadi suatu bangsa yang besar dan kudus di hadapan Tuhan. Selanjutnya, dalam rangkaian pemerintahan Allah, pelaksanaan tugas diembankan kepada para utusan-Nya (Hakim-hakim, Imam, Raja dan Nabi). Secara berkelanjutan, pemerintahan Allah akan diwujudkan dengan kehadiran utusan-Nya sebagai simbol penyertaan Tuhan atas umat-Nya. Kerajaan Allah adalah kerajaan imam, sebagai pelebagaan rencana Allah dalam kesempurnaan karya penyelamatan-Nya. Di sana bisa dilihat, bahwa pemerintahan Tuhan (Teokrasi) itu ada tidak ada putus-putusnya dalam sejarah perjalanan Perjanjian Lama. Dalam kaitannya dengan demokrasi, umat Tuhan diberikan kepercayaan untuk turut serta menentukan pemerintahan itu, untuk ini sebaliknya dalam kaitannya dengan pemerintahan Allah adalah untuk melanjutkan karya penyelamatan Allah. Baik umat atau pemimpin semua memiliki peran masing-masing untuk melanjutkan karya dan penyelamatan Allah.

Dalam pemilihan langsung, sebagai pemilih hendaknya umat menggunakan haknya sebagai perpanjangan tangan Tuhan dalam menyatakan suara kebenaran dengan memilih pemimpin yang sesuai dengan

kehendak Tuhan. Sedangkan sebagai orang yang dipilih hendaknya bisa menyandarkan dan mendekatkan diri kepada pewujudnyataan kehendak Allah dalam karya penyelamatan Allah atas umat-Nya. Demikianlah hendaknya pemerintahan Allah lebih ditunjukkan dalam bentuk pemerintahan dunia yang bebas, jujur dan adil sebagaimana tuntutan dari demokrasi itu sendiri.

KEPUSTAKAAN

- Acher, Glearson L. *The Zondervan Pictorial Encyclopedia of the Bible*, (Michigan: Grand Rapids, 1976).
- Adam, Charles J, dkk. (eds.). *The Encyclopedia of Religion (Vol 7)*, (New York: Micmillian Library Reference, 1995).
- Barth, Christoph. *Theologia Perjanjian Lama I*, (Jakarta: BPK Gunung Mulia, 2008).
- _____. *Theologia Perjanjian Lama III*, (Jakarta: BPK Gunung Mulia, 2001).
- Botterweck, G. Johannes dan Helmer Ringgren (eds.), *Theological Dictionary of The Old Testament Vol.II dan VI*, (Michigan: Grand Rapids, 1974).
- Buttrick, George Arthur. *The Interpreter's Dictionary of the bible*, (Nashville: Abingdon Press, 1986).

- Dyrness, William. *Tema-tema dalam Teologi Perjanjian Lama*, (Malang: Gandum Mas, 2000).
- Efendi, Muchtar. dan Sutopo. *Kegagalan Pemerintah dalam fakta dan angka*, (Jakarta: Pustaka Fahima, 2010).
- Elisson, H.L. *The Message of the Old Testament*, (Michigan: Grand Rapids, 1969).
- Hinson, David F. *Sejarah Israel Pada Zaman Alkitab*, (Jakarta: BPK Gunung Mulia, 2000).
- Hoogerwerf, A. *Politikologi*, (Jakarta: Erlangga, 1985).
- Huntington, Samuel P. *Tertib Politik pada Masyarakat yang sedang Berubah*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004).
- Gruchy, John W. *Agama Kristen dan demokrasi: Suatu Teologi bagi Tata Dunia yang Adil*, (Jakarta: BPK- Gunung Mulia, 2003).
- Joeniarto, *Demokrasi dan Sistem Pemerintahan Negara*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1990).
- Lasor, William Sanford, dkk. *Old Testament Survey: The Message, Form, and Background of the Old Testament*, (Michigan: Grand Rapids, 1969).
- Marijan, Kacung. *Pilkada Langsung: Resiko Politik, Biaya Ekonomi, Akuntabilitas Politik, dan Demokrasi Lokal*, <http://www.komunitasdemokrasi.or.id> (e-mail: info@komunitasdemokrasi.or.id)
- Rothlisberger, H. *Firmanku Seperti Api*, (Jakarta: BPK Gunung Mulia, 2010).
- Silaen, Victor. (ed.), *Peran Kristen Dalam Membangun Masyarakat Sipil*, (Jakarta: Pustaka Tangga, 2004).
- Sirait, Saut. *Politik Kristen di Indonesia: Suatu Tinjauan Etis*, (Jakarta: BPK Gunung Mulia, 2001).
- Sitompul, Einar M. *Teologi Politik: Agama-Agama Kekuasaan*, (Jakarta: Badan Penelitian dan Pengembangan PGI, 2004).
- Ujan, Andre Ata. *Keadilan dan Demokrasi*, (Yogyakarta: Kanisius, 2001).